

DAFTAR ISI

Hal

Kata Pengantar

Daftar Isi

Bab I Pendahuluan

1.1 Latar Belakang

1.2 Tugas Pokok dan Fungsi

1.3 Permasalahan Utama (Strategic Issued)

1.4 Maksud dan Tujuan

1.5 Dasar Hukum

1.6 Gambaran Umum

Bab II Perencanaan data Perjanjian Kinerja

2.1 Rencana Strategis

2.1.1 Visi

2.1.2 Misi

2.2 Indikator Kerja Utama

2.3 Cara Pencapaian Tujuan Dan Sasaran

2.4 Perencanaan Perjanjian Kinerja

2.5 Penetapan/ Perjanjian Kinerja

Bab III Akuntabilitas Kinerja

3.1 Capaian Kinerja Utama

3.2 Analisis Capaian Kinerja

3.3 Realisasi Anggaran

Bab IV Penutup

4.1 Kesimpulan

4.2 Saran

Ikhtisar Eksekutif

KATA PENGANTAR

Puji syukur ke hadirat Allah SWT, berkat dan Inayah-nya Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) Kecamatan Lubuk Begalung Kota Padang Tahun 2018 telah disusun dan disajikan sebagai pejabaran dari berbagai kegiatan yang telah dilaksanakan.

Laporan Kinerja merupakan akuntabilitas dari pelaksanaan tugas dan fungsi yang dipercayakan kepada setiap instansi pemerintah atas penggunaan anggaran, Hal terpenting yang diperlukan dan Penyusunan laporan kinerja dan evaluasi serta pengungkapan (disclousure) secara memadai hasil analisis terhadap pengukuran kinerja.

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) diharapkan dapat digunakan sebagai masukan bagi pengelolaan dan piñata kinerja Kecamatan Lubuk Begalung Kota Padang juga dapat dimanfaatkan untuk tujuan peningkatan kinerja dan akuntabilitas instansi Pemerintah serta dapat dijadikan pedoman atau acuan bagi pejabat sturktural maupun Karyawan Kecamatan Lubuk Begalung Kota Padang dalam Melaksanakan Tugas pokok dan fungsinya.

Tersusunya Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) ini merupakan hasil kerja semua pihak yang turut serta memberikan informasi dan masukan sehingga penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) Kecamatan Lubuk Begalung Kota Padang Tahun 2018 ini dapat diselesaikan.

Padang Januari 2018

Plt Camat Lubuk Begalung

Drs. ARFIAN

NIP. 19650707 198602 1 005

BAB I PENDAHULUAN

A. Gambaran umum Kecamatan Lubuk Bagaluang

Kecamatan Lubuk Bagaluang merupakan salah satu Kecamatan dalam wilayah Kota Padang yang membujur dari arah timur ke barat. Secara geografis, Kecamatan Lubuk Bagaluang terletak antara 100° 21' 11" BT 0° 58' LS, dengan ketinggian rata – rata dari permukaan laut 15 m dan luas wilayah 30,91 Km² serta secara administratif berbatas sebagai berikut :

- Sebelah Utara : Kecamatan Padang Timur dan Kecamatan Pauh
- Sebelah Selatan : Samudra Indonesia dan Kecamatan Bungus Teluk Kabung.
- Sebelah Timur : Kecamatan Lubuk Kilangan dan Kecamatan Bungus Teluk Kabung.
- Sebelah Barat : Kecamatan Padang Timur dan Kecamatan Padang Selatan.

Temperatur rata – rata 22,5° C – 31, 5° C, dengan curah hujan rata – rata 314,47 mm/bulan.

Kecamatan Lubuk Bagaluang sesuai dengan Peraturann daerah Kota Padang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Kelurahan Kota Padang terdiri dari 15 (lima belas) Kelurahan dengan data luas dan jumlah RT/RW sebagai berikut :

Tabel 1.1
Daftar Kelurahan, Jumlah RW dan RT dan Luas Kelurahan
Se Kecamatan Lubuk Bagaluang

No	Kelurahan	Jumlah RW dan RT		Luas Km ²	% Luas
		RW	RT		
1	Cengkeh Nan XX	5	20	0,72	2,33
2	Kampung Baru Nan XX	7	25	0,82	2,65
3	Tanah Sirah Piai Nan XX	8	32	1,95	6,31

4	Tanjung Saba Pitameh Nan XX	5	17	1,75	5,66
5	Lubuk Bagaluang Nan XX	10	34	1,55	5,01
6	Tanjung Aua Nan XX	2	8	0,46	1,49
7	Gurun Laweh Nan XX	5	23	1,03	3,33
8	Koto Baru Nan XX	11	43	1,03	3,33
9	Banuaran Nan XX	13	44	1,29	4,17
10	Parak Laweh P. Aie Nan XX	11	41	2,17	7,02
11	Batuang Taba Nan XX	7	34	1,55	5,01
12	Kampung Jua Nan XX	8	27	3,09	10,00
13	Pagambiran Ampalu Nan XX	20	80	5,15	16,66
14	Pampangan Nan XX	12	48	1,13	3,66
15	Gates Nan XX	9	35	7,22	23,36
	Jumlah	133	510	30,91	100

Sumber : Seksi Pemberdayaan Masyarakat Kec. Lubuk Bagaluang

Penduduk Kecamatan Lubuk Bagaluang keadaan Desember 2018 adalah 113.747 jiwa, terdiri dari 55.934 laki - laki dan 57.813 perempuan, dengan konsentrasi penduduk terbanyak berada pada Kelurahan Pagambiran Ampalu 23.998 jiwa, dengan rincian sebaran penduduk sebagaimana daftar tabel berikut :

Tabel 2.1
Daftar Jumlah Penduduk Kecamatan Lubuk Bagaluang
Per Desember 2018

No	Kelurahan	Jumlah Penduduk		Jumlah	%
		Laki-laki	Perempuan		
1	Cengkeh Nan XX	2.083	2.085	4.168	3,66

2	Kampung Baru Nan XX	2.727	2.731	5.458	4,79
3	Tanah Sirah Piai Nan XX	2.820	2.712	5.532	4,85
4	Tanjung Saba Pitameh nan XX	2.387	2.633	5.020	4,41
5	Lubuk Bagaluang Nan XX	2.535	2.679	5.214	4,58
6	Tanjung Aua Nan XX	688	706	1.394	1,22
7	Gurun Laweh Nan XX	2.832	3.011	5.843	5,13
8	Koto Baru Nan XX	3.391	3.407	6.798	5,97
9	Banuaran Nan XX	4.195	4.174	8.369	7,35
10	Parak Laweh P. Aie Nan XX	5.938	5.967	11.905	10,46
11	Batuang Taba Nan XX	3.527	5.103	8.630	7,58
12	Kampung Jua Nan XX	2.563	2.577	5.140	4,51
13	Pagambiran Ampalu Nan XX	12.074	11.924	23.998	21,09
14	Pampangan Nan XX	4.943	4.961	9.904	8,70
15	Gates Nan XX	3.231	3.143	6.374	5,70
	Jumlah	55.934	57.813	113.747	100

Sumber : Seksi Tata Pemerintahan Kec. Lubuk Bagaluang

Kecamatan Lubuk Bagaluang adalah salah satu dari sebelas Kecamatan yang ada di Kota Padang dengan pembentukan struktur organisasi berdasarkan pada Peraturan Daerah Kota Padang Nomor 19 Tahun 2008 tentang pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Kecamatan (Lembaran Daerah Kota Padang Tahun 2008 Nomor 19, Tambahan Lembaran Daerah Kota Padang Tahun 2008 Nomor 17).

1. Tugas Pokok dan Fungsi

Mengacu kepada Undang-undang Nomor 32 Tahun 2002 Tentang Pemerintah Daerah, Peraturan Daerah Kota Padang Nomor 15 Tahun 2004 Tentang Pembentukan Organisasi Kecamatan, dan Keputusan Walikota Padang No. 56 Tahun 2011 Tentang Uraian Tugas Pokok Organisasi Kecamatan, Kecamatan merupakan Perangkat Daerah yang mempunyai wilayah kerja tertentu dan merupakan unsur staf Pemerintah

Daerah yang mempunyai tugas pokok membantu Walikota dalam penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan, dan pembinaan kemasyarakatan dalam wilayah kerjanya.

Tupoksi Kecamatan Lubuk Bagaluang diatur dalam Peraturan Walikota Padang No. 56 Tahun 2011:

- a. Kecamatan adalah wilayah kerja Camat sebagai Perangkat Daerah
- b. Camat adalah pemimpin dan koordinator penyelenggaraan pemerintahan di wilayah kerja kecamatan yang dalam pelaksanaan tugasnya memperoleh pelimpahan kewenangan pemerintahan dari Walikota untuk menangani sebagian urusan otonomi daerah, dan menyelenggarakan tugas umum pemerintahan
- c. Sekretaris adalah Sekretaris pada kecamatan
- d. Kelurahan adalah wilayah kerja lurah sebagai perangkat Daerah di bawah kecamatan
- e. Kepala Seksi adalah Kepala Seksi pada Kecamatan
- f. Kepala Sub Bagian adalah Kepala Sub Bagian pada Sekretariat Kecamatan.

Pada saat peraturan Walikota ini mulai berlaku, maka keputusan Walikota Padang Nomor 39 Tahun 2004 tentang Uraian tugas Pokok dan Fungsi Organisasi Kecamatan dinyatakan dicabut dan tidak berlaku lagi.

Untuk melaksanakan tugas pokok tersebut, fungsi yang melekat pada Kecamatan adalah :

- a. Pengkoordinasian penyelenggaraan pemerintahan di wilayah kecamatan.
- b. Penyelenggaraan kegiatan pembinaan ideologi negara dan kesatuan bangsa.
- c. Penyelenggaraan pelayanan dan pemberdayaan masyarakat.
- d. Penyelenggaraan tugas-tugas pemerintahan umum dan keagrariaan.
- e. Penyelenggaraan kegiatan pembinaan, pengendalian, dan pengawasan pembangunan.
- f. Pembinaan ketentraman dan ketertiban wilayah.
- g. Pelaksanaan koordinasi operasional UPT Dinas/LT Daerah.
- h. Penyelenggaraan kegiatan pembinaan, pembangunan dan pengembangan partisipasi masyarakat.
- i. Penyusunan program, pembinaan administrasi ketatausahaan dan rumah tangga.

Selain tugas tersebut Camat melaksanakan kewenangan pemerintahan yang dilimpahkan oleh Walikota untuk menangani sebagian urusan otonomi daerah, yang meliputi aspek :

- a. Perizinan;
- b. Rekomendasi;
- c. Koordinasi;
- d. Pembinaan;
- e. Pengawasan;
- f. Fasilitasi;
- g. Penetapan;
- h. Penyelenggaran; dan
- i. Kewenangan lain yang dilimpahkan

2. Bentuk Pelayanan di Kecamatan

Dalam penyelenggaran tugas umum pemerintahan sebagai pelimpahan tugas dan wewenang dari Walikota, Kecamatan Lubuk Bagaluang sesuai Peraturan Daerah Nomor 08/2005 melaksanakan pelayanan sebagai berikut :

- a. Permohonan Kartu Keluarga Baru
- b. Penggantian Kartu Keluarga
- c. Permohonan Kartu tanda Penduduk (KTP)
- d. Surat Keterangan Kematian
- e. Surat Keterangan Pindah
- f. Surat Keterangan Domisili
- g. Izin Mendirikan Bangunan dengan luas 61 – 100 M²

3. Komposisi Aparatur Kecamatan Lubuk Bagaluang

Pegawai Negeri Sipil pada Kecamatan Lubuk Bagaluang per Desember 2016 berjumlah sebanyak 121 orang dengan komposisi sebagaimana tabel dibawah ini :

Tabel 3.1
Kondisi Pegawai Negeri Sipil Kecamatan Lubuk Bagaluang
Berdasarkan Golongan per Januari 2019

No	Golongan	Jumlah
1.	IV a	4 orang
2.	III a	7 orang
3.	III b	21 orang
4.	III c	30 orang
5.	III d	23 orang
6.	II a	3 orang
7.	II b	6 orang
8.	II c	6 orang
9.	II d	2 orang
10.	I b	1 orang

Tabel 4.1
Kondisi Pegawai Negeri Sipil Kecamatan Lubuk Bagaluang
Berdasarkan Esselon per Agustus 2018

No	Eselon	Jumlah
1.	III a	1 orang
2.	III b	1 orang
3.	IV a	17 orang
3.	IV b	60 orang

Tabel 5.1
Kondisi Pegawai Negeri Sipil Kecamatan Lubuk Bagaluang
Berdasarkan Pendidikan Formal per Agustus 2018

No	Pendidikan Formal	Jumlah
1.	S2	8 orang
2.	S1	43 orang
3.	Diploma /D3	4 orang
4.	SLTA	45 orang
5.	SLTP	1 orang
6.	SD	1 orang

Tabel 6.1
Daftar Pegawai Negeri Sipil Kecamatan Lubuk Bagaluang
Yang akan Pensiun dari Tahun 2014-2019

No	Tahun	Jumlah
1.	2015	- Orang
2.	2016	5 orang
3.	2017	14 orang
4.	2018	8 orang
5.	2019	Orang

B. ASPEK STRATEGIS ORGANISASI

1. Aspek Strategis Organisasi

Kecamatan Lubuk Bagaluang merupakan Kecamatan yang berada di kawasan usaha dan pendidikan, sehingga menjadikan Kecamatan Lubuk Bagaluang yang memiliki potensi didalam usaha dan pendidikan. Yang menciptakan pengembangan didalam pembangunan disektor ekonomi melalui usaha dan dunia pendidikan. Yang tergambar dari banyaknya perusahaan yang berada di Wilayah kecamatan Lubuk Bagaluang dan tempat pendidikan.

2. Permasalahan Utama

Kecamatan Lubuk Bagaluang merupakan kecamatan yang memiliki karakter masyarakat heterogen sehingga didalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsi diantaranya adalah :

- a. Masih rendahnya sumber daya aparatur yang ada dalam menjalankan roda pemerintahan kecamatan
- b. Masih terbatasnya sarana dan prasarana pendukung kegiatan
- c. Masih belum maksimalnya pelaksanaan tupoksi

BAB II

PERENCANAAN KINERJA

A. PERENCANAAN KINERJA

Perencanaan kinerja tahun 2018 diperlukan untuk memberikan sasaran pada penyusunan kegiatan dan pengalokasian sumber daya yang dimiliki. Setiap sasaran strategis yang telah ditetapkan dijabarkan kedalam sejumlah program. Didalam setiap program terdapat berbagai kegiatan yang merupakan langkah nyata untuk melaksanakan program tersebut pada tahun yang bersangkutan dengan mengolah sumber daya yang ada, adapun penetapan kinerja tahun 2018 melalui sasaran kinerja sebagai berikut :

1. Meningkatkan Kualitas Pelayanan;
2. Meningkatnya Koordinasi dan Pemberdayaan Kelembagaan yang Ada di Kecamatan;
3. Meningkatnya Kinerja Penyelenggaraan Tugas Umum Pemerintahan Kecamatan;
4. Meningkatnya Pemberdayaan Masyarakat dalam Pembangunan;
5. Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja dan Keuangan.

B. PERJANJIAN KINERJA

Penetapan kinerja merupakan janji yang akan diwujudkan oleh Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) sebagai pelaksana kegiatan Pemerintah Daerah, yang menggambarkan capaian kinerja yang terwujud dalam satu tahun tertentu. Ruang lingkup penetapan kinerja mencakup seluruh tugas Pokok dan fungsi SKPD, yang diutamakan terhadap program utama yang menggambarkan keberadaan SKPD serta isu strategis yang di hadapi, dengan mempertimbangkan sumber daya yang tersedia.

Petapan kinerja sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari system akuntabilitas kinerja instansi pemerintah yang merupakan upaya dalam membangun manajemen pemerintahan yang transparan, partisipatif dan akuntabel.

Adapun Perencanaan dan perjanjian kinerja Tahun 2018 ini dituangkan dalam dokumen penetapan Kinerja sesuai tabel dibawah ini :

Tabel 7
Penetapan Kinerja Tahun 2018
Kecamatan Lubuk Bagaluang

No	SasaranStrategis	IndikatorKinerja	Target (%)
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	Meningkatnya Kualitas Pelayanan	1. Persentase Indeks Kepuasan Masyarakat 2. Persentase Pengaduan yang Ditindaklanjuti 3. Tingkat Kepatuhan Layanan Publik Versi Ombudsman	80 80 80
2.	Meningkatnya Koordinasi dan Pemberdayaan Kelembagaan yang ada di Kecamatan	Persentase Rekomendasi Hasil Koordinasi yang di Tindaklanjuti	90
3.	Meningkatnya Kinerja Penyelenggaraan Tugas Umum Pemerintahan Kecamatan	1. Persentase Pelayanan Administrasi Kependudukan Tepat Waktu 2. Presentase Waktu Pelayanan Administrasi Umum Lainnya Tepat Waktu 3. Persentase Kelurahan yang Memenuhi Standar Kriteria Baik 4. Presentase IMB yang Diterbitkan 5. Presentasi Jalan Lingkungan dalam Kondisi Baik	85 85 70 100 70
4.	Meningkatnya Pemberdayaan Masyarakat dalam Pembangunan	1. Presentase Drainase dalam Kondisi Baik 2. Presentase Kelurahan yang Melaksanakan Musrenbang sesuai Ketentuan 3. Presentase Kontribusi Swadaya	70 90 90

		Masyarakat Membangun Kewilayahan 4. Presentase Lembaga Kemasyarakatan Aktif 5. Presentase Lembaga Pengelolaan Sampah (LPS) Kelurahan Aktif 6. Jumlah Aset yang Terdata 7. Pelaksanaan MTQ Tingkat Kecamatan (Jumlah Kafilah yang Dikirim untuk MTQ Tingkat Kota)	80 80 Baik 100
5.	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja dan Keuangan	1. Nilai Evaluasi AKIP 2. Presentase Temuan Inspektorat yang Dirindaklanjuti	Baik 100

BAB III

AKUNTABILITAS KINERJA

A. CAPAIAN KINERJA ORGANISASI

Pengukuran kinerja merupakan jembatan antara perencanaan strategis dengan pelaporan akuntabilitas. SKPD dapat dikatakan berhasil jika indikator-indikator yang ditetapkan telah mengarah kepada pencapaian tujuan dan sasaran. Tanpa adanya pengukuran kinerja sangat sulit dicari pembenaran yang logis atas pencapaian tujuan dan sasaran SKPD.

Pengukuran kinerja adalah suatu proses sistematis dan berkesinambungan untuk menilai keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan sesuai dengan program, kebijakan, sasaran dan tujuan yang telah ditetapkan dalam mewujudkan misi dan visi. Pengukuran kinerja dilakukan dengan menggunakan indikator kinerja kegiatan dengan memanfaatkan data kinerja yang dapat diperoleh melalui data internal dan eksternal.

Pengukuran kinerja dilakukan dengan membandingkan tingkat capaian target dari masing-masing indikator kinerja yang telah ditetapkan dalam rencana strategis dan rencana kinerja. Pengukuran kinerja mencakup tingkat capaian target (rencana tingkat capaian) dari masing-masing kelompok indikator kinerja kegiatan dan tingkat pencapaian target (rencana tingkat capaian) dari masing-masing kelompok sasaran yang telah ditetapkan dalam dokumen rencana kerja.

Pengukuran tingkat pencapaian sasaran didasarkan pada data hasil pengukuran kinerja kegiatan. Pengukuran kinerja dimaksud dapat dilakukan dengan menggunakan formulir Pengukuran Kinerja (PK) dan formulir Pengukuran Rencana Kinerja Tahunan (RKT). Pengukuran pencapaian kinerja dilakukan dengan menggunakan dua metode, yaitu metode evaluasi kinerja dan metode perbandingan capaian sasaran. Metode evaluasi kinerja dilakukan dengan menggunakan formulir PK dan RKT, perbandingan dilakukan dengan melihat perbandingan antara rencana dan realisasi untuk masing-masing indikator kinerja kegiatan. Metode ini terutama akan bermanfaat untuk melakukan evaluasi internal atas kelemahan-kelemahan dan kendala-kendala yang terjadi dalam organisasi dalam pelaksanaan kegiatannya.

Metode perbandingan capaian kinerja sasaran dilakukan dengan membandingkan antara rencana kinerja (*performance plan*) yang diinginkan

dengan realisasi (*performance result*) yang dicapai organisasi, selanjutnya akan dilihat *performance gap* yang ada serta tindakan perbaikan yang diperlukan dimasa yang akan datang. Metode ini terutama bermanfaat untuk memberikan gambaran kepada pihak-pihak eksternal tentang sejauh mana pelaksanaan misi organisasi dalam rangka mewujudkan tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan. Namun demikian, sangat disadari bahwa kedua metode tersebut membutuhkan perumusan indikator kinerja yang relevan dan langsung, objektivitas dan tidak bias, spesifik, cukup, kuantitatif, terinci, praktis dan dapat diyakini. Kondisi inilah yang sepenuhnya belum dapat disajikan dalam LAKIP Kecamatan Lubuk Begalung ini. Sampai saat ini keberhasilan program-program banyak diukur dengan menggunakan indikator *output* dan *outcome*.

Dalam melakukan evaluasi keberhasilan atau kegagalan capaian kinerja setiap sasaran, maka digunakan skala pengukuran 4 (empat) kategori sebagai berikut :

Tabel 3.1
Skala Pengukuran Capaian Sasaran LAKIP Tahun 2018

No.	Skala Capaian Kinerja	Kategori
1.	Lebih dari 100%	Sangat Baik
2.	76% s.d 100%	Berhasil
3.	55% s.d 75%	Cukup Berhasil
4.	< 55%	Tidak Berhasil

Evaluasi Pengukuran Pencapaian Kinerja Secara umum Kecamatan Lubuk Begalung telah mampu merealisasikan secara maksimal seluruh target-target dari sasaran indikator kinerja 2018 yang ditetapkan dalam Rencana Kinerja Tahun 2018. Dalam melaksanakan (merealisasikan) RKT 2018 yang telah ditetapkan dalam rencana strategis, Kecamatan Lubuk Begalung telah berhasil memenuhi sebahagian besar program dan kegiatan yang ada pada tahun 2018.

Nilai capaian kinerja sasaran diperoleh dari hasil perbandingan antara realiasasi dengan target sasaran kinerja yang direncanakan dikali dengan 100%. Sesuai dengan data kinerja tahunan sebagaimana terlihat pada tabel, maka sebaran nilai capaian kinerja sasaran yang direncanakan

oleh Kecamatan Lubuk Begalung tahun 2018, dapat diklasifikasikan sebagai berikut :

1. Analisis Perbandingan Target dan Realisasi Kerja Tahun 2018

Adapun capaian kinerja tahun 2018 sesuai dengan target kerja yang telah ditetapkan dalam perjanjian kinerja yang telah ditetapkan dapat dilihat pada tabel di bawah ini :

Tabel 3.2
Pengukuran Capaian Kinerja Tahun 2018

No	SasaranStrategis	IndikatorKinerja	Target (%)	Realisasi	Capaian (%)
(1)	(2)	(3)	(4)		
1.		1. Persentase Indeks Kepuasan Masyarakat 2. Persentase Pengaduan yang Ditindaklanjuti	90 90	80 100	100 100
2.	Meningkatnya Koordinasi dan Pemberdayaan Kelembagaan	Persentase Rekomendasi Hasil Koordinasi yang diTindaklanjuti	90	90	100
3.	Meningkatnya Kinerja Penyelenggaraan Tugas Umum Pemerintahan Kecamatan	1. Persentase Pelayanan Administrasi Kependudukan Tepat Waktu 2. Presentase Waktu Pelayanan Administrasi Umum Lainnya Tepat Waktu 3. Persentase Kelurahan yang Memenuhi Standar Kriteria Baik 4. Presentase IMB yang Terialisasi	85 85 70 100	70 100 70 100	85 100 100 100

		5. Presentasi Jalan Lingkungan dalam Kondisi Baik	100	70	85
		6. Presentase Drainase Dalam Kondisi Baik	80	80	100
4.	Meningkatnya Pemberdayaan Masyarakat dalam Pembangunan	1. Persentase Kelurahan yang Melaksanakan Musrembang Sesuai	100	100	100
		2. Persentase Kontribusi Swadaya Masyarakat Membangun Kewilayahan	90	90	100
		3. Persentase Lembaga Kemasyarakatan Aktif	90	90	100
		4. Persentase Lembaga Pengelola Sampah (LPS) Kelurahan Aktif	80	80	100
5.	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja dan Keuangan	1. Nilai Evaluasi AKIP	Baik	Baik	100
		2. Presentase Temuan Inspektorat yang Dirindaklanjuti	100	100	100
Rata-rata Capaian Kinerja					100%

Keberhasilan capaian strategis di tahun 2018 menggambarkan Kecamatan Lubuk Begalung telah berhasil melaksanakan indikator kinerja, dengan rata-rata capaian kinerja sebesar 100%.

2. Analisis Perbandingan Realisasi Kinerja dan Capaian Kinerja Tahun 2017 dan Tahun 2018

Perbandingan realisasi capaian kinerja tahun 2017 dan tahun 2018 dapat dilihat pada persentase realisasi pada masing-masing indikator kinerja, karena indikator kinerja pada tahun 2017 berbeda dengan indikator kinerja pada tahun 2018, adapun perbandingan realisasi kinerja tahun 2017 dan tahun 2018, dapat dilihat pada tabel di bawah ini

Tabel 3.3

Perbandingan Realisasi Indikator Kinerja Tahun 2017 dan Indikator Kinerja Tahun 2018

No	Indikator Kinerja		Tahun 2017			Tahun 2018		
	2017	2018	Target	Realisasi	Capaian	Target	Realisasi	Capaian
1.	Persentase usulan prioritas yang dapat direalisasikan di Tingkat Kota	Persentase Indeks Kepuasan Masyarakat	80%	70 %	87.5%	80%	80%	100%
2.	Persentase peserta pelatihan yang mampu membuka usaha sendiri	Persentase Pengaduan yang Ditindaklanjuti	50%	45%	90%	80%	100%	100%
3.	Jumlah warga yang ikut berpartisipasi dalam kegiatan pembangunan infrastruktur	Tingkat Kepatuhan Layanan Publik Versi Ombudsman	750 Orang	2.623	349%	80%	80%	100%
4.	Nilai swadaya masyarakat dalam pelaksanaan manunggal	Persentase Rekomendasi Hasil Koordinasi yang di Tindaklanjuti	Rp 2.500.000	Rp 2.264.432	90.5%	90%	90%	100%
5.		Persentase	50%	30%	60%	85%	70%	85%

6.	Persentase jumlah penurunan pelanggaran Perda Persampahan	Pelayanan Administrasi Kependudukan Tepat Waktu	500 kg	450 kg	90%	85%	100%	100%
	Jumlah volume sampah terpilah yang dapat dimanfaatkan	Presentase Waktu Pelayanan Administrasi Umum Lainnya Tepat Waktu	50%	40%	90%	70%	70%	100%
	Persentase jumlah penurunan pelanggaran disiplin aparat	Persentase Kelurahan yang Memenuhi Standar Kriteria Baik	11	11	100%	100%	100%	100%
	Jumlah kafilah MTQ yang berprestasi tingkat kota padang	Presentase IMB yang Diterbitkan	150 IMB	63 IMB	42%	70%	70%	100%
Jumlah izin mendirikan bangunan yang dikeluarkan	Presentasi Jalan Lingkungan dalam Kondisi Baik	100%	130%	100%	70%	70%	100%	

tepat waktu	Presentase Drainase	100%	82%	82%	90%	90%	100%
Presentase pencapaian target penerimaan izin mendirikan bangunan (IMB)	dalam Kondisi Baik						
Persentase pencapaian target penerimaan PBB-P2	Presentase Kelurahan yang Melaksanakan Musrenbang sesuai Ketentuan				90%	80%	90%
	Presentase Kontribusi Swadaya Masyarakat Membangun Kewilayahan				80%	75%	95%
	Presentase Lembaga Kemasyarakatan Aktif				80%	70%	90%
	Presentase Lembaga Pengelolaan Sampah (LPS) Kelurahan Aktif				Baik	Baik	100%
					100%	100%	100%

	Jumlah Aset yang Terdata				Baik	Baik	100%
	Pelaksanaan MTQ Tingkat Kecamatan (Jumlah Kafilah yang Dikirim untuk MTQ Tingkat Kota)				100%	100%	100%
	Nilai Evaluasi AKIP Presentase Temuan Inspektorat yang Dirindaklanjuti						

B. REALISASI ANGGARAN

Dalam rangka pelaksanaan Program dan Kegiatan Tahun 2018, dari APBD Kota Padang Tahun 2018 untuk SKPD Kecamatan Lubuk Bagaluang didukung anggaran sebesar Rp. 16.734.636.457,72 (termasuk perubahan) yang dibagi dalam Belanja Tidak Langsung yakni sebesar Rp.10.851.575.910,72 dan Belanja Langsung sebesar Rp.5.883.060.547,00.

Pada Belanja Tidak Langsung realisasi fisik sebesar 100% dan realisasi keuangan sebesar 93,63% atau Rp 10,851,575,910.72. Sedangkan dalam Belanja Langsung dibagi dalam 11 (sebelas) Program dan 31 (tiga puluh satu) Kegiatan dengan realisasi fisik sebesar 100% dan realisasi keuangan sebesar 99,50 % atau Rp. 5,883,060,547.

Adapun rincian dari Realisasi Program Kegiatan (Belanja Langsung dan Belanja Tidak Langsung) Anggaran Tahun 2018 sesuai dengan dokumen Perjanjian Kinerja dapat kami jabarkan di bawah ini:

A. BELANJA TIDAK LANGSUNG

Realisasi Belanja Tidak Langsung dapat dilihat pada Tabel di bawah ini :

Tabel 3.4

Realisasi Kegiatan Gaji, Tunjangan dan Tambahan Penghasilan

No	Kegiatan/Pagu Anggaran	Realisasi Anggaran	Realisasi		
			Fisik (%)	Keu (%)	Ket
1.	Gaji dan Tunjangan PNS Rp.6,285,972,302.72	Rp. 5,722786,788.00	100	91,04	
2.	Tambahan Penghasilan Rp. 209,600,000.00	Rp.209,800,000.00	100	100	

B. BELANJA LANGSUNG

Belanja langsung (per program/kegiatan), realisasi Kegiatan Tahun 2018 dapat di lihat pada Tabel di bawah ini :

1. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran

Pagu anggaran Rp. 848,051,562.00 Realisasi Anggaran Rp. 829,435,200.00.

Berikut Uraian Realisasi Kegiatan pada Program Pelayanan Administrasi Perkantoran.

Tabel 3.5

Uraian Kegiatan Program Pelayanan Administrasi Perkantoran

No	Kegiatan/Pagu Anggaran	Realisasi Anggaran	Realisasi	
			Fisik (%)	Keu (%)
1.	Penyediaan Jasa Surat Menyurat Rp. 3,960,000.00	Rp. 3,960,000.00	100	100
2	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumberdaya Air Dan Listrik Rp. 150,834,660.00	Rp. 137,835,320.00	100	91,38
3.	Penyediaan Jasa Pemeliharaan Dan Perizinan Kendaraan Dinas / Operasional Rp. 6,225,000.00	Rp. 4,553,850.00	100	73,15
4.	Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor Rp.93,596,000.00	Rp. 93,595,704.00	100	100
5.	Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja Rp.15,775,000.00	Rp. 15,733,750.00	100	99,74
6.	Penyediaan Alat Tulis Kantor Rp. 70,369,500.00	Rp. 70,369,500.00	100	100
7.	Penyediaan Barang Cetak dan Pengadaan Rp.71,820,000.00	Rp. 71,819,250.00	100	100
8.	Penyediaan Komponen Intalasi Listrik / Penerangan Bangunan Kantor Rp.9,025,000.00	Rp. 9,025,000.00	100	100

9.	Penyediaan Peralatan Dan Pelengkapan Kantorr Rp.119,500,000.00	Rp. 115,945,850.00	100	96,94
10.	Penyediaan Bahan Bacaan Dan Peraturan Perundang-Undangan Rp.23,400,000.00	Rp. 23,385,000.00	100	99,94
11.	Penyediaan Makanan Dan Minuman Rp.97,800,000.00	Rp. 97,784,700.00	100	99,98
12.	Rapat-rapat Koordinasi Dan Konsultasi Keluar Daerah Rp.102,298,002.00	Rp. 102,784,700.00	100	99,79
13.	Penyediaan Peralatan Kebersihan Rp.25,148,400.00	Rp. 25,148,400.00	100	100
14.	Pengikatan Pelayanan Administrasi Perkantoran Rp.58,300,000.00	Rp. 58,300,000.00	100	100

2. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur

Pagu anggaran Rp. 346,508,000.00 Realisasi Anggaran Rp. 345,878,381.00. Berikut Uraian Realisasi Kegiatan pada Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur.

Realisasi Kegiatan Tahun 2018 dapat dilihat pada Tabel di bawah ini :

Tabel 3.6

Realisasi Kegiatan Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur

No	Kegiatan/Pagu Anggaran	Realisasi Anggaran	Realisasi	
			Fisik (%)	Keu (%)
1.	Pengadaan Mebeluer Rp. 40,500,000.00	Rp. 40,210,000.00	100	99,28
2	Pemeliharaan Rutin /Berkala Gedung Kantor Rp. 0.00	Rp. 0.00	0	0
3.	Pemeliharaan Rutin /Berkala Kendaraan Dinas/Operasional Rp. 221,108,000.00	Rp. 220,768,381.00	100	99,85
4.	Pemeliharaan Rutin /Berkala Peralatan Gedung Kantor Rp. 20,000,000.00	Rp. 20,000,000.00	100	100
5.	Pemeliharaan Rutin /Berkala Mebeuler Rp.14,900,000.00	Rp. 14,900,000.00	100	100
6.	Pemeliharaan Rutin /Berkala Alat Listrik, Air, dan Telepon Rp.50,000,000.00	Rp. 50,000,000.00	100	100

3. Program Peningkatan Disiplin Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan

Pagu anggaran Rp. 30,000,000.00 Realisasi Anggaran Rp. 29,890,00.00. Berikut Uraian Realisasi Kegiatan pada Program Peningkatan Disiplin Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan.

Realisasi Program dan Kegiatan Tahun 2018 dapat dilihat pada Tabel di bawah ini.

Tabel 3.7

Realisasi Kegiatan Program Peningkatan Disiplin Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan

No	Kegiatan/Pagu Anggaran	Realisasi Anggaran	Realisasi	
			Fisik (%)	Keu (%)
1.	Penyusunan Laporan Capaian Kinerja Dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD Rp. 30,000,000.00	Rp. 29,890,00.00.	100	99,63

4. Program Koordinasi dan Pemberdayaan Kelembagaan

Pagu anggaran Rp. 37,828,500.00 Realisasi Anggaran Rp. 33,773,300.00. Berikut Uraian Realisasi Kegiatan pada Program Koordinasi dan Pemberdayaan Kelembagaan.

Realisasi Program dan Kegiatan Tahun 2018 dapat dilihat pada Tabel di bawah ini :

Tabel 3.8

Realisasi Kegiatan Program Koordinasi dan Pemberdayaan Kelembagaan

No	Kegiatan	Hasil	Realisasi	
			Fisik (%)	Keu (%)
1.	Koordinasi Lintas Kelembagaan	Rp. 33,773,300.00.	100	99,63

	Rp. 37,828,500.00			
--	-------------------	--	--	--

5. Program Pengembangan Kecamatan

Pagu anggaran Rp. 1.836,514,605.00 Realisasi Anggaran Rp. 1.835,627,225.00. Berikut Uraian Realisasi Kegiatan pada Program Pengembangan Kecamatan.

Realisasi Program dan Kegiatan Tahun 2018 dapat dilihat pada Tabel di bawah ini :

Tabel 3.9

Realisasi Kegiatan Program Pengembangan Kecamatan

No	Kegiatan/Pagu Anggaran	Realisasi Anggaran	Realisasi	
			Fisik (%)	Keu (%)
1.	Pengembangan Sosial Kemasyarakatan Rp. 112,527,150.00	Rp. 112,368,900.00	100	99,86
2.	Pengembangan Ekonomi Kemasyarakatan Rp. 63,366,400.00	Rp. 63,213,100.00	100	99,76
3.	Data Stimulan Kecamatan Rp. 75,000,000.00	Rp. 74,831,000.00	100	99,77
4.	Pengembangan Administrasi Pemerintahan Rp. 81,698,625.00	Rp. 81,460,825.00	100	99,71
5.	Pengembangan Infrastruktur Kecamatan Rp. 564,408,000.00	Rp. 774,832,000.00	100	99,47
6.	Data Stimulan Kelurahan Rp. 774,872,930.00	Rp. 728,921,400.00	100	99,99

6. Program Pembinaan Sistem Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Bawahan

Pagu anggaran Rp. 103,443,780.00 Realisasi Anggaran Rp. 100,290,896.00. Berikut Uraian Realisasi Kegiatan pada Program Pembinaan Sistem Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Bawahan.

Realisasi Program dan Kegiatan Tahun 2018 dapat dilihat pada Tabel di bawah ini :

Tabel 3.10

Uraian Kegiatan Program Pembinaan Sistem Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Bawahan

No	Kegiatan/Pagu Anggaran	Realisasi Anggaran	Realisasi	
			Fisik (%)	Keu (%)
1.	Penerapan Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan(PATEN) Di Kota Padang Rp. 103,443,780.00	Rp. 100,290,896.00	100	96,95

7. Program Pengendalian Pemanfaatan Ruang

Pagu anggaran Rp. 237,603,000.00 Realisasi Anggaran Rp. 237,393,700.00. Berikut Uraian Realisasi Kegiatan pada Program Pengendalian Pemanfaatan Ruang.

Realisasi Program dan Kegiatan Tahun 2018 dapat dilihat pada Tabel di bawah ini :

Tabel 3.11

Realisasi Kegiatan Program Pengendalian Pemanfaatan Ruang

No	Kegiatan/Pagu Anggaran	Realisasi Anggaran	Realisasi	
			Fisik (%)	Keu (%)
1.	Pengendalian Dan Pengawasan Bangunan Liar Rp. 237,603,000.00	Rp. 237,393,700.00	100	99,91

8. Program Pengembangan Kinerja Pelolaan Persampahan

Pagu anggaran Rp. 63,512,750.00 Realisasi Anggaran Rp. 63,360,550.00. Berikut Uraian Realisasi Kegiatan pada Program Pengembangan Kinerja Pelolaan Persampahan.

Realisasi Program dan Kegiatan Tahun 2018 dapat dilihat pada Tabel di bawah ini :

Tabel 3.12

Realisasi Kegiatan Program Pengembangan Kinerja Pelolaan Persampahan

No	Kegiatan/Pagu Anggaran	Realisasi Anggaran	Realisasi	
			Fisik (%)	Keu (%)
1.	Penyediaan Prasarana Dan Sarana Pengelolaan Persampahan Rp. 63,512,750.00	Rp. 63,360,550.00	100	99,76

9. Program Peningkatan Kapasitas Aparatur Pemerintah Desa

Pagu anggaran Rp. 2,053,414,500.00 Realisasi Anggaran Rp. 2,053,204,300.00. Berikut Uraian Realisasi Kegiatan pada Program Peningkatan Kapasitas Aparatur Pemerintah Desa.

Realisasi Program dan Kegiatan Tahun 2018 dapat dilihat pada Tabel di bawah ini :

Tabel 3.11

Uraian Kegiatan Program Peningkatan Kapasitas Aparatur Pemerintah Desa

No	Kegiatan/Pagu Anggaran	Realisasi Anggaran	Realisasi	
			Fisik (%)	Keu (%)
1.	Pembinaan Kelembagaan Dan Administrasi Lembaga Kemasyarakatan RT/RW Rp. 2,053,414,500.00	Rp. 2,053,204,300.00	100	99,99

10. Program Peningkatan Pemahaman dan Pelaksanaan Agama

Pagu anggaran Rp. 297,903,100.00 Realisasi Anggaran Rp. 292,633,003.00. Berikut Uraian Realisasi Kegiatan pada Program Peningkatan Pemahaman dan Pelaksanaan Agama.

Realisasi Program dan Kegiatan Tahun 2018 dapat dilihat pada Tabel di bawah ini :

Tabel 3.12

Uraian Kegiatan Program Peningkatan Pemahaman dan Pelaksanaan Agama

No	Kegiatan/Pagu Anggaran	Realisasi Anggaran	Realisasi	
			Fisik (%)	Keu (%)
1.	Pelaksanaan MTQ Tingkat Kota dan Tingkat Kecamatan Rp. 297,903,100.00	Rp. 292,633,003.00	100	98,23

11. Program Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah

Pagu anggaran Rp. 28,280,750.00 Realisasi Anggaran Rp. 28,223,100.00. Berikut Uraian Realisasi Kegiatan pada Program Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah.

Realisasi Program dan Kegiatan Tahun 2018 dapat dilihat pada Tabel di bawah ini :

Tabel 3.13

Uraian Kegiatan Program Peningkatan Pemahaman dan Pelaksanaan Agama

No	Kegiatan/Pagu Anggaran	Realisasi Anggaran	Realisasi	
			Fisik (%)	Keu (%)
1.	Sensus Barang Milik Daerah Pemerintahan Kota Padang Rp. 19,550,250.00	Rp. 19,522,600.00	100	99,86
2.	Pengamanan dan Monitoring Aset Daerah Rp. 8,730,500.00	Rp. 8,700,500.00	100	99,66

Padang, 19 Januari 2019

CAMAT,



Drs. ARFIAN

Pembina Tk.I/IV.b

NIP. 19650707 198602 1 005